



**Perkuat Ketahanan Ekologi Sungai, Bangun Kesadaran Bencana**

TAJUK

**A**mbrolnya talut di Kali Winongo, Tegaiarjo, Kota Jogja, kembali menjadi pengingat keras bahwa relasi kota ini dengan sungai-sungainya yang melintasinya masih rapuh. Pernyataan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) yang menyoroti keberadaan bangunan di bantaran sungai, bukanlah tuduhan tanpa dasar. Fakta di lapangan menunjukkan bangunan yang berdiri terlalu dekat dengan badan sungai secara langsung mengubah karakter aliran, mempersempit ruang air, dan memperbesar

gaya gerus saat debit meningkat. Kasus ambrolnya Balai Pertemuan RT57/RW13 di sempadan Sungai Buntung saat hujan deras menjadi bukti konkret. Talut yang seharusnya berfungsi melindungi tebing sungai justru kalah oleh tekanan aliran karena kehilangan ruang alami di sekitar sempadan sungai. Beberapa tahun lalu, peristiwa serupa terjadi di permukiman padat di sepanjang Kali Code, wilayah Gondokusuman. Talut ambrol, rumah warga terancam, dan aktivitas masyarakat terganggu. Hasil temuan kala itu

menunjukkan pola yang sama. Bangunan berdiri di sempadan, drainase tidak terkelola, serta penguatan tebing yang tidak didesain menahan debit ekstrem. Secara empiris, sungai di wilayah perkotaan di Kota Pelajar memang menghadapi tekanan berlapis yakni perubahan tata guna lahan di hulu, intensitas hujan yang kian ekstrem akibat perubahan iklim, serta penyempitan ruang sungai di hilir. Akibatnya, ketika sempadan sungai yang secara regulatif berfungsi sebagai ruang penyangga dipenuhi bangunan, maka risiko bencana tentu akan

menjadi keniscayaan. Talut bukan solusi tunggal jika ruang alami di sempadan sungai terus dilanggar, sementara di hulu sungai tekanan lingkungan akibat pengurangan ruang alami di daerah aliran sungai (DAS) terus berkurang akibat derap pembangunan. Karena itu, penataan sungai dan utamanya kawasan DAS, harus segera dipetakan secara menyeluruh dan dijalankan dengan sangat ketat. Semua pendirian bangunan di kawasan DAS wajib memperhitungkan risiko hidrologis dan

memiliki izin mendirikan bangunan yang sah. Tidak boleh ada kompromi atas nama kebutuhan ruang. Apalagi sampai keselamatan publik yang harus dipertaruhkan. Bangunan yang terbukti melanggar tata ruang sempadan sungai harus ditertibkan secara tegas dan konsisten. Pengalaman penataan permukiman di Kali Code melalui program *Mundur Madhep Kali* menunjukkan bahwa solusi tidak selalu identik dengan pengusuran semata. Melalui penataan ulang orientasi bangunan, pembukaan ruang

sempadan, dan penguatan partisipasi warga, kawasan bantaran sungai justru bisa menjadi lebih aman dan layak huni. Pendekatan serupa patut dipertimbangkan untuk Kali Winongo. Menata sungai bukan sekadar urusan teknis, melainkan keberanian politik dan ketegasan kebijakan. Jika kota ini ingin selamat dari bencana berulang, maka sungai harus diberi kembali ruangnya. Perkuat ketahanan ekologisnya, dan bangun kesadaran serta kesiapsiagaan bencana pada setiap warga yang hidup di sempadan sungai.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005